

TESIS

**PENERAPAN PROGRAM KORPORASI PETANI DAN DAMPAKNYA
PADA USAHATANI PADI
(Studi Kasus di Kelompok Tani Semangat 45)**

***IMPLEMENTATION OF FARMER CORPORATE PROGRAM AND ITS
IMPACT ON RICE FARMING
(Case Study in the Semangat 45 Farmer Group)***

MARWAH PRATIWI

P042191026



**PROGRAM STUDI MAGISTER AGRIBISNIS
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

**PENERAPAN PROGRAM KORPORASI PETANI DAN DAMPAKNYA
PADA USAHATANI PADI
(Studi Kasus di Kelompok Tani Semangat 45)**

***THE IMPLEMENTATION OF FARMER CORPORATE PROGRAM AND
ITS IMPACT ON RICE FARMING
(Case Study in the Semangat 45 Farmer Group)***

**MARWAH PRATIWI
P042191026**

THESIS

Submitted in Partial fulfillment of the requirements for the degree of Master
of Science (MSc)

**MASTER PROGRAM IN AGRIBUSSINESS
POSTGRADUATE
HASANUDDIN UNIVERSITY
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**PENERAPAN PROGRAM KORPORASI PETANI DAN DAMPAKNYA
PADA USAHA TANI PADI
(STUDI KASUS KELOMPOK TANI SEMANGAT 45)**

Disusun dan diajukan oleh:

MARWAH PRATIWI

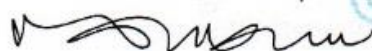
Nomor Pokok P042191026

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Agribisnis Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin pada tanggal 02 Maret 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping




Prof. Dr. Ir. Rahim Darma, MS
NIP: 1959 0401 1985 02 1001

Dr. Ir. Mahyuddin, M.Si
NIP: 1968 0702 1993 03 1003

Ketua Program Studi

Dekan Sekolah Pascasarjana



Dr. Ir. Mahyuddin, M.Si
NIP: 1968 0702 1993 03 1003



Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc
NIP: 1967 0308 1990 03 1001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Marwah Pratiwi

NIM : P042191026

Program Studi : Agribisnis

Jenjang : S2

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul:

**PENERAPAN PROGRAM KORPORASI PETANIDAN DAMPAKNYA
PADA USAHATANI PADI
(Studi Kasus di Kelompok Tani Semangat 45)**

Adalah benar tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Tesis ini karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, April 2022



Marwah Pratiwi
Marwah Pratiwi

KATA PEGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, pemilik segala kesempurnaan, memiliki segala ilmu dan kekuatan yang tak terbatas, yang telah memberikan kami kekuatan, kesabaran, ketenangan, dan karunia selama ini sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Nabi pembawa cahaya ilmu pengetahuan yang terus berkembang hingga kita merasakan nikmatnya hidup zaman ini.

Tesis ini disusun berdasarkan hasil penelitian mengenai Penerapan Program Korporasi Petani dan Dampaknya pada Usahatani Padi (Studi Kasus di Kelompok Tani Semangat 45) yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Agribisnis Fakultas Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Pada penelitian ini, hambatan dan rintangan yang dihadapi merupakan proses yang menjadi kesan dan pendewasaan diri. Semua ini tentunya tidak lepas dengan adanya kemauan yang kuat dalam hati dan kedekatan kepada Allah SWT.

Melalui kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan ucapan terkhusus untuk penyemangatku, Bapak Rohimahulloh dan Mama cantik sedunia Nurhidayah yang telah menjadi orang tua yang sangat sabar dalam menghadapi semua bentuk kepenatan penulis, serta telah memberikan dukungan, kasih sayang, perhatian dan doa yang tiada henti-hentinya bagi penulis terima kasih karena telah menjadi penguat bagi penulis, penulis

tidak mampu melangkah sejauh ini tanpa dampungannya. Untuk kakak Riman & Kakak Ayu, Kakak Budi & Kak Titin, Kakak Icha & Kak Erwin, adekku satu-satunya Dana & Rudi, yang senantiasa bertanya sekaligus menasehati, memberi dukungan, perhatian, kasih sayang serta doa kepada penulis dan dua ponakan solihah ku Nuhaa dan Rumaysha yang memberikan pelukan paling hangat dan celoteh riang gembiranya di saat ante wa' nya lagi tidak baik-baik saja. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Bapak Prof. Dr. Ir. Rahim Darma, MS dan Bapak Dr. Mahyuddin, M.Si selaku pembimbing yang telah memberikan banyak bimbingan kepenulisan dan mengarahkan selama penyusunan tesis ini.
- 2) Bapak Prof. Dr. Ir. Didi Rukmana, MS, Ibu Prof. Dr. Ir. Nuraini Sirajuddin, S.Pt., M.Si.,IPU, Dr. Nurjannah Hamid, S.E., M.Agr, selaku penguji yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat berguna untuk kesempurnaan tesis.
- 3) LPDP Indonesia yang telah memberikan penulis kepercayaan sebagai salah satu awardee untuk mengenyam kembali pendidikan tanpa memikirkan biaya perkuliahan, semoga kelak penulis bisa memberikan berkontribusi banyak untuk negara.
- 4) Arul Yan yang selalu meluangkan waktunya untuk penulis, selalu mendengarkan, menghibur, yang tidak pernah bosan jadi supporterku, dan menjadi teman diskusi paling baik dan pengertian dalam lika liku pertesisan ini.

- 5) Teman-teman seperjuangan untuk meraih gelar magister Pia, Ica, Aidah, Kamel, Biccu, Indah, Kak rahmi yang selalu memilih untuk menertawakan temannya terlebih dahulu baru ditolong dan selalu memberikan masukan kepada penulis.
- 6) Teman-teman yang selalu mendorong penulis untuk tidak menunda revisi tesis Aswar, Nasir, Tami, Firman, Zul, Aslam yang kalau datang ke perpustakaan pasti marah-marah dulu karena belum ada progress dan bisa tiap hari nelpon mengingatkan kalau lagi dating rese'nya
- 7) Teman-teman Pascasarjana Agribisnis 2019 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih atas segala bentuk bantuannya selama proses perkuliahan ini.
- 8) Ijal dan Ipul, duo gondrong ku yang selalu siap sedia jadi supporter setiap saat mungkin karena merasa kasihan sama penulis yang dibantai habis pada saat seminar hasil hahaha.
- 9) Umi, titin, angki, dan siapa pun yang terus mendoakan yang terbaik dalam proses menyelesaikan tugas akhir ini
- 10) Yang terakhir dan yang paling penting ialah terimakasih sebesar-besarnya pada diri sendiri yang telah bertahan dan berjuang sejauh ini, selalu mencoba mengais semangat dari rasa "hampir" putus asa di tengah revisi yang tak kunjung usai, You did a great job wa 😊

Dengan kata pengantar ini, penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan segala kritik serta saran membangun sangat diharapkan dalam penyusunan tesis ini. Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan terutama kepada penulis.

Makassar, April 2022

Marwah Pratiwi

ABSTRAK

MARWAH PRATIWI. P042191026. “Penerapan Program Korporasi Petani Dan Dampaknya pada Usahatani Padi (Studi Kasus Kelompok Tani Semangat 45)” (dibimbing oleh Rahim Darma dan Mahyuddin).

Pemerintah memulai kebijakan pengembangan kawasan pada tahun 2012 dengan dikeluarkannya Permentan Nomor 50 dan pada tahun 2018 pengembangan kawasan pertanian dilakukan dengan berbasis korporasi petani melalui pendekatan yang menggabungkan aspek teknis dan kelembagaan petani. Sulawesi Selatan sendiri merupakan salah satu daerah yang melaksanakannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh penerapan program korporasi petani dan dampak perubahannya terhadap usahatani padi yang dijalankan kelompok tani. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Panrannuangku, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar pada bulan Juni-September 2021. Metode penelitian adalah studi kasus pada kelompok tani Semangat 45 yang tergabung dalam korporasi petani yang dibentuk oleh pemerintah. Informan adalah anggota kelompok tani dan mitra dari pihak swasta yaitu kemitraan petani sebagai penyuplai bibit dan agen pemasaran, dan pihak pemerintah yang mewakili BPTP Sul-Sel, Dinas Pertanian Takalar, dan BPP Polongbangkeng Utara. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif untuk mengkaji implementasi program korporasi petani dan analisis Uji Beda untuk mengetahui perbedaan usahatani petani sebelum dan sesudah pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan program korporasi petani belum berjalan sesuai dengan seluruh petunjuk teknis PKPTPBKP. Ada enam dari sembilan kriteria yang terpenuhi dan empat dari sepuluh kegiatan terlaksana dalam tahap kegiatan percontohan serta ada tiga dari delapan yang terlaksana dalam tahapan kegiatan pelaksanaan program. Pembentukan korporasi petani Semangat 45 belum melaksanakan seluruh aktifitas secara berkelompok, belum memiliki mitra kelembagaan dari hulu hingga hilir untuk mencapai skala efisiensi. Terjadi perbedaan penerapan teknologi usahatani, sehingga terjadi peningkatan produksi 2-3 ton/ha dan pendapatan petani.

Kata Kunci: Pengembangan Kawasan Pertanian, Korporasi petani, Usahatani Padi, Kelompok Tani

ABSTRAK

MARWAH PRATIWI. P042191026. “The Implementation of Farmer Corporate Program and Its Impact on Rice Farming (Case Study of Farmer Groups Semangat 45)” (Supervised by Rahim Darma and Mahyuddin).

The government started a regional development policy in 2012 with the issuance of Minister of Agriculture Number 50 and in 2018 the development of agricultural areas was carried out on a farmer corporation basis through an approach that combines technical and farmer institutional aspects. South Sulawesi itself is one of the regions that implement it. This study aims to thoroughly analyze the implementation of the farmer corporation program and the impact of its changes on rice farming run by farmer groups. This research was carried out in Panrannuangku Village, North Polongbangkeng District, Takalar Regency in June-September 2021. The research method is a case study on the Spirit 45 farmer group who is a farmer corporation formed by the government. Informants are members of farmer groups and partners from the private sector, namely farmer partnerships as seed suppliers and marketing agents, and the government representing South Sulawesi AIAT, Takalar Agriculture Service, and North Polongbangkeng BPP. The data analysis used was descriptive to examine the implementation of the farmer's corporate program and the analysis of the Difference Test to determine the differences in farmers' farming before and after the implementation of the program. The results of the study indicate that the implementation of the farmer corporation program has not been carried out in accordance with all PKPTPBKP technical guidelines. Six out of nine criteria were met and four out of ten activities were carried out in the pilot activity stage and three out of eight were carried out in the program implementation activity stage. The formation of the spirit 45 farmer corporation has not carried out all activities in groups, has not had institutional partners from upstream to downstream to achieve scale efficiency. There is a difference in the application of farming technology, resulting in an increase in production of 2-3 tons/ha and farmers' income.

Keywords: Agricultural Area Development, Farmer's Corporation, Rice Farming, Farmers Group

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
1. BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 <i>Research Gap</i>	8
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Manfaat Penelitian	10
2. BAB II METODE PENELITIAN	12
2.1 Kerangka Pemikiran.....	12
2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	20
2.3 Populasi dan Sampel	20
2.4 Jenis dan Sumber Data.....	21
2.5 Teknik dan Analisis Data.....	23
2.5.1 Analisis Deskriptif.....	24
2.5.2 Uji Beda (<i>Paired Sample T-Test</i>)	27

3. BAB III HASIL.....	29
3.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian	29
3.1.1 Penggunaan Lahan.....	29
3.1.2 Sarana Alsintan	30
3.1.3 Kelembagaan Usaha Tani.....	32
3.1.4 Kelembagaan Penyuluhan	34
3.2 Deskripsi Objek Penelitian	37
3.2.1 Umur.....	37
3.2.2 Tingkat Pendidikan	38
3.2.3 Luas Lahan	39
3.3 Penerapan Corporate Farming pada Kelompok Tani	
Semangat 45	41
3.3.1 Kegiatan Percontohan	42
3.3.2 Tahap Pelaksanaan	75
3.4 Analisis Uji Beda (<i>Paired Sample T-Test</i>) pada Perubahan Proses	
dan Hasil Produksi Usahatani Padi	76
4. BAB IV PEMBAHASAN.....	78
4.1 Penerapan Program Korporasi Petani	78
4.2 Analisis Uji Beda.....	88
V. KESIMPULAN	91
5.1 Kesimpulan.....	91
5.2 Rekomendasi.....	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tahap Pelaksanaan Program Korporasi Petani	25
Tabel 2. Penggunaan Lahan Sawah Pertanian	29
Tabel 3. Sarana Alsintan.....	31
Tabel 4. Kelembagaan Saprodi, Pemasaran <i>Output</i> , dan Poktan	32
Tabel 5. Tenaga Penyuluh BPP Polut.....	35
Tabel 6. Sarana Pendukung Lembaga Penyuluhan BPP	36
Tabel 7. Identitas Petani Berdasarkan Umur.....	37
Tabel 8. Identitas Petani Berdasarkan Tingkat Pendidikan	39
Tabel 9. Identitas Petani Berdasarkan Luas Lahan.....	40
Tabel 10. Kriteria Pemilihan Lokasi Penerapan Korporasi Petani	43
Tabel 11. Penilaian Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan	45
Tabel 12. Tujuan Koordinasi Lintas Sektor	47
Tabel 13. Tahapan Pelaksanaan Analisis Diagnostik.....	50
Tabel 14. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Percontohan	52
Tabel 15. Identifikasi Permasalahan Usahatani	52
Tabel 16. Tujuan Program Korporasi Petani Tahun 2018-2020	57
Tabel 17. Komponen Teknologi	67
Tabel 18. Korporasi Petani berdasarkan Sistem Agribisnis.....	69
Tabel 19. Tahapan Pelaksanaan PKPTPBKP.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema/Kerangka Konseptual	20
Gambar 2. Ilustrasi Korporasi Petani	56
Gambar 3. Kerangka Rancangan Inovasi Kelembagaan	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Anggota Kelompok Tani Semangat 45.....	98
Lampiran 2. Panduan Wawancara.....	100
Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan	103
Lampiran 4. Dokumentasi Pengumpulan Data.....	106

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pertanian dalam perumusan kebijakan di Indonesia terus mengalami perkembangan dari masa ke masa dan kebijakan tersebut tetap berada pada usaha pemenuhan kebutuhan pangan serta pencapaian swasembada. Usaha-usaha yang dilakukan dalam kebijakan tersebut juga terus berupaya membangun pertanian dengan pemberdayaan petani sebagai pelaku utamanya demi peningkatan kesejahteraan, meski demikian masalah yang dihadapi petani masih saja sama yaitu kepemilikan lahan yang semakin sempit, tingkat pengetahuan/keterampilan individu petani masih relatif rendah, modal usaha yang dimiliki masih relatif kecil, organisasi di tingkat petani masih lebih bersifat organisasi/kelompok sosial, serta pola usahatani yang belum berorientasi pada usaha tani sebagai perusahaan/industri yang didasari jiwa kewirausahaan atau masih tergolong usahatani kecil (Susilowati, 2016).

Dalam cakupan yang lebih luas, pembangunan pertanian akhirnya terkendala pada produktivitas yang rendah, sistem pemasaran yang kurang efisien, dan harga produk pertanian yang fluktuatif. Pemerintah berupaya mengatasinya melalui kebijakan subsidi harga produksi, penetapan harga pembelian pemerintah (HPP), tataniaga dan perdagangan, pengembangan infrastruktur pertanian, penguatan stok pangan, dan penciptaan kelembagaan penunjang, namun hasil yang didapat belum optimal.

Berdasarkan pemantauan, evaluasi dan rekomendasi berbagai kajian empiris, salah satu strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui pengembangan kawasan pertanian (Sulaiman, 2017).

Pemerintah memulai kebijakan pengembangan kawasan pada tahun 2012 dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian. Dalam Permentan tersebut, dikemukakan bahwa kawasan pertanian merupakan gabungan dari sentra-sentra pertanian yang terkait secara fungsional baik dalam faktor sumber daya alam, sosial budaya, maupun infrastruktur, sedemikian rupa sehingga memenuhi batasan luasan minimal skala efektivitas manajemen pembangunan wilayah (Kementan, 2012). Kawasan ini dikembangkan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan produksi pertanian secara efisien dan memudahkan pemasaran produk karena terkonsentrasi dalam jumlah yang banyak (Setiyanto, 2013). Pembangunan Kawasan pertanian dilakukan sebagai upaya peningkatan produksi pertanian melalui perencanaan wilayah yang komprehensif dan terpadu.

Dalam perkembangannya, Permentan Nomor 50 Tahun 2012 diubah menjadi Permentan Nomor 56 Tahun 2016, kemudian pemerintah juga mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 830 Tahun 2016 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional dan pada tahun 2018 sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden untuk membuat kelompok besar petani yang berpikir dengan manajemen modern,

serta melakukan proses agribisnis sendiri mulai dari pengadaan input, budidaya, pascapanen, pengolahan, pengemasan, sampai pemasaran hasil dalam suatu manajemen yang baik, Menteri Pertanian menetapkan Permentan Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani.

Corporate farming adalah suatu bentuk kerjasama ekonomi dari sekelompok petani dengan orientasi agribisnis melalui konsolidasi pengelolaan lahan sehamparan (Dinas Pertanian, 2000). *Corporate farming* pada prinsipnya merupakan upaya kerjasama antar petani dengan menggabungkan usaha yang relatif kecil menjadi suatu usaha skala besar yang memenuhi skala ekonomi dalam satu naungan manajemen kelembagaan usaha. Dengan adanya pengintegrasian kekuatan ini, maka diperoleh produktivitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pasar, baik dari sisi kuantitas, kualitas, maupun kontinuitas. Selain itu, *corporate farming* menjadikan usaha tani menjadi lebih efisien, lebih berdayasaing, serta menghasilkan nilai tambah yang diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani (Bawono, 2018).

Corporate farming sendiri telah diterapkan di beberapa daerah salah satunya di Yogyakarta, Bantul yang merupakan hasil kerjasama BI dengan Fakultas Pertanian Universitas Gadjahmada yang menemukan bahwa konsolidasi lahan pada penerapan program ini berdampak langsung terhadap rerata luasan lahan yang dikelola, yaitu meningkat dari 0,07 ha menjadi 0,26 ha dan dari segi produktivitas terjadi peningkatan yang cukup

besar dari semula 3,5 ton menjadi 7,7 ton per ha (Bank Indonesia DIY, 2017). Hasil positif program ini juga dijelaskan oleh Sinuraya (2011) bahwa walaupun konsolidasi usaha tani masih berupa uji coba di beberapa lokasi dapat dikatakan berhasil untuk mengurangi laju alih fungsi lahan dan fragmentasi lahan pertanian.

Di Sulawesi Selatan sendiri konsep *Corporate Farming* juga telah diterapkan berdasarkan Permentan yang sama yaitu Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani. Dalam Permentan dijelaskan bahwa arah kebijakan dan strategi pembangunan pertanian dengan pendekatan pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani dimaksudkan untuk menggabungkan antara rencana, implementasi kebijakan, program, kegiatan dan anggaran pembangunan kawasan pertanian dengan upaya untuk mendorong aspek pemberdayaan petani yang dilakukan dalam suatu kelembagaan ekonomi petani dan dilakukan di daerah yang telah ditetapkan agar menjadi suatu kesatuan yang utuh dalam perspektif sistem usahatani sehingga dapat meningkatkan produksi tanaman pangan yang berkelanjutan, berdaya saing, dan mampu mensejahterahkan semua pelaku usaha yang terlibat di dalamnya secara berkeadilan (Kementan, 2018).

Program korporasi petani tersebut berada di Kel. Panrannuangku, Kec. Polongbangkeng Utara, Kab. Takalar yang berfokus pada komoditi padi sejak tahun 2018 namun berdasarkan observasi awal di lapangan menunjukkan pengimplementasian program tersebut belum berjalan

maksimal oleh karena itu perlu dilakukan analisis untuk mengetahui secara menyeluruh penerapan program tersebut selama tiga tahun berjalannya dan menarik pelajaran tentang permasalahan yang dihadapi sebagai bahan perbaikan bagi pelaksanaan selanjutnya atau untuk proses replikasi di daerah lain.

1.2 Rumusan Masalah

Pertanian menjadi salah satu sektor yang mendominasi perekonomian di Sulawesi Selatan, namun kontribusi sektor pertanian cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tercatat sebesar 23,13%, namun pada tahun 2019 menurun hingga sebesar 21,28%. Penurunan kontribusi sektor pertanian disebabkan peningkatan kontribusi sektor lain, seperti *real estat* dan perdagangan yang tumbuh lebih pesat. Pertumbuhan sektor lain di luar sektor pertanian menyebabkan kebutuhan terhadap lahan juga meningkat. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Pada periode 2017-2019, terjadi penurunan luas lahan sawah sebesar 4.065 ha. Di Kabupaten Takalar sendiri berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa luas panen padi di Kecamatan Polongbangkeng Utara tahun 2014 adalah 2.667 Ha, tahun 2015 menurun menjadi 2.470 Ha, tahun 2016 meningkat menjadi 2.791 Ha, tahun 2017 menurun menjadi 2.640 Ha dan tahun 2018 menurun lagi menjadi 2.626 Ha. Sementara luas produksi (ton) padi tahun 2012 17.527,52, tahun 2013 menurun menjadi 11.306,82, tahun 2014

menjadi 13.391,04, tahun 2015 menurun menjadi 6.069,35 dan tahun 2016 mengalami sedikit peningkatan menjadi 12.966,61 (BPS Takalar, 2016) sedangkan jumlah petaninya tidak mengalami penurunan yaitu berkisar 3. 635 orang.

Dengan kata lain hal ini membuat produktivitas petani juga menurun di tengah kebutuhan akan pangan semakin meningkat seiring bertambah jumlah penduduk. *Corporate farming* bisa menjadi solusi dalam masalah keterbatasan lahan yang dimiliki petani dengan memaksimalkan kelompok tani yang ada guna meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani oleh karena itu diperlukan langkah pengembangan. Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani (KPBKP) merupakan pendekatan baru dalam upaya peningkatan produksi yang memenuhi *economies of size dan economies of scale*, dimana pendekatannya dilakukan dari sisi teknis dan kelembagaan. Dengan demikian, perhatian yang diberikan tidak hanya pada *output* atau capaian seperti produksi dan produktivitas, tetapi juga SDM yang terlibat (Prakosa, 2000).

Beberapa penelitian tentang penerapan program ini di berbagai daerah di Indonesia menyiratkan bahwa *corporate farming* memang sulit untuk dilaksanakan oleh petani seperti Suminah dan Utami (2004) yang menemukan bahwa konsep awal CF tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya di Kab. Grobogan terutama dalam manajemen *corporate farming* untuk mengatur/mengelola anggota sesuai dengan anjuran dalam bidang pemasaran, dalam penelitian Karsiaji (2003) juga menemukan bahwa

penerapannya di Jawa Timur belum diterima petani terutama penyerahan pengolahan lahan dan konsolidasi lahan, sekitar 60% petani tidak bersedia lahan usahanya dalam satu manajemen dan mereka sebagai pemegang saham. Penelitian terbaru juga menunjukkan hasil yang sama bahwa secara umum kegiatan belum sejalan dengan konsep Kawasan dan korporasi yang terintegrasi, petani masih menjalankan kegiatan sebagai individu hanya bertanggung jawab pada lahan garapannya dan korporasi belum mampu menjadi lembaga perpanjangan tangan petani.

Pengkajian suatu penerapan kegiatan, dalam hal ini proyek percontohan Pengembangan KJBKP perlu dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui secara menyeluruh pelaksanaan program ini di lapangan dan menarik pelajaran tentang permasalahan yang dihadapi sebagai bahan perbaikan bagi pelaksanaan selanjutnya atau untuk proses replikasi di daerah lain. Salah satu bentuk pengkajian yang dapat dilakukan ialah dengan evaluasi secara berkala untuk mengetahui apabila program/kegiatan berjalan di luar rencana serta menjadi masukan untuk perbaikan selanjutnya. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada penerapan korporasi petani di lapangan yang dilihat secara mendalam dan menyeluruh.

1.3 *Research Gap*

Corporate Farming sendiri merupakan konsep perusahaan pertanian yang sudah lama mulai digaungkan di Indonesia, kebijakan tentang hal ini sudah ada dari era Presiden Abdul Rahman Wahid meskipun realitas di

lapangan masih jauh dari konsep yang semestinya. Oleh karena itu, ada banyak penelitian yang juga mengangkat tema ini, seperti penelitian yang dikemukakan oleh Mustafa dan Kurnia (2015) yang penelitiannya menunjukkan bahwa sistem *corporate farming* memiliki prospek yang baik untuk diterapkan pada koperasi, baik dari sisi ekonomi, kelembagaan, dan sosial. Apriani (2015) mengatakan untuk mendorong keberhasilan kelembagaan dengan sistem *corporate farming* maka diperlukan pembinaan yang lebih intensif baik oleh pemerintah maupun oleh swasta, dan yang terakhir penelitian yang dilakukan oleh Karsiaji dkk (2003), penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan petani melalui model "*corporate farming*" belum dapat diterima petani, terutama penyerahan pengelolaan lahan dan konsolidasi lahan. Sekitar 60% petani tidak bersedia lahan usahanya dalam satu manajemen dan petani sebagai pemegang saham. Pemberdayaan petani yang sesuai dan dapat diterima petani adalah model "*cooperative farming*" yaitu pengelolaan sarana produksi dan pemasaran secara korporasi.

Ketiga penelitian tersebut memiliki tema yang sama yaitu mengkaji secara umum mengenai penerapan konsep *corporate farming*, namun penelitian mengenai kesesuaian penerapan program dengan Permentan yang membahas tentang Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan Berbasis Korporasi Petani masih terbilang jarang, bahkan mungkin belum ada, apalagi jika kita mengkaji di lokasi yang penerapannya terbilang baru.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan korporasi petani berdasarkan petunjuk teknis, dan menganalisis perubahan pada proses dan hasil produksi usahatani.

Sehubungan dengan hal tersebut dan agar tercapainya pembahasan yang sesuai dengan harapan maka penulis merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1 Bagaimana pelaksanaan korporasi petani pada usaha tani padi di Kel. Panrangnuangku, Kec. Polongbangkeng Utara, Kab. Takalar?
- 2 Apakah ada perbedaan selama penerapan korporasi petani pada usaha tani padi di Kel. Panrangnuangku, Kec. Polongbangkeng Utara, Kab. Takalar?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini terbagi atas dua bagian yaitu:

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan merumuskan kembali penerapan korporasi petani yang tepat digunakan oleh kelompok tani Semangat 45 sebagai pelaksana utama kegiatan di lapangan guna memaksimalkan hasil yang bisa didapatkan

2. Tujuan Khusus

Tujuan umum di atas akan dicapai melalui tahapan pencapaian tujuan khusus sebagai berikut:

- a. Menganalisis capaian kinerja pelaksanaan korporasi petani pada usaha tani padi di Kel. Panrannuangku, Kec. Polongbangkeng Utara, Kab. Takalar
- b. Menganalisis potensi dan hambatan pada penerapan korporasi petani pada usaha tani padi di Kel. Panrannuangku, Kec. Polongbangkeng Utara, Kab. Takalar

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan pihak-pihak yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat membuat petani mengkonsolidasikan proses produksi usahatannya guna mendapatkan:
 - a. Akses penyuplai saprodi yang murah, tepat waktu dan kualitas yang terjamin sehingga menekan biaya produksi serta mutu yang baik secara menyeluruh
 - b. Pengaturan waktu tanam dan pemupukan serta dosis yang tepat untuk mengendalikan OPT dan memaksimalkan hasil produksi
 - c. Jaminan akses pasar dengan harga jual yang lebih tinggi dibandingkan harga pasar

2. Hasil penelitian ini juga bisa membantu petani membentuk kelembagaan berbadan hukum untuk memudahkannya memperoleh akses permodalan.
3. Penelitian ini bisa memperjelas peran pemerintah daerah untuk menindaklanjuti program korporasi petani dalam menjembatani kelembagaan petani dengan lembaga penunjang untuk bermitra.

BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Kerangka Pemikiran

Pengembangan *corporate farming* bertujuan untuk mewujudkan suatu usaha pertanian yang mandiri, berdaya saing dan berkesinambungan melalui pengelolaan lahan secara korporasi. Pendekatan dalam pengembangannya adalah pembangunan pedesaan berbasis agribisnis dengan memanfaatkan peluang sumberdaya dan kelembagaan masyarakat secara optimal (Setiawan, 2008). Prinsip pengembangan *corporate farming* ini adalah membangun keterpaduan dan kemandirian dalam pengambilan keputusan bersama dalam mengelolah sumber daya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani (Prakoso, 2000). Mekanismenya, usaha tani kecil yang bergabung dalam model konsolidasi ataupun *corporate farming* dalam suatu hamparan/wilayah dikelola dengan sistem manajemen pertanian yang baik, seperti manajemen mekanisasi, varietas yang sama, *treatment* teknologi yang sama, sistem panen yang baik dan pengelolaan pasca panen yang baik (Tupawana dan Enoch, 2002)

Permentan Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 menjelaskan bahwa Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berbasis Korporasi Petani adalah Kawasan Pertanian Tanaman Pangan yaitu padi, jagung, kedelai dan ubi kayu yang dikembangkan dengan strategi memberdayakan dan mengkorporasikan petani. Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani adalah kawasan pertanian yang dikembangkan dengan strategi

memberdayakan dan mengkorporasikan petani dan korporasi petani sendiri berarti kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani.

Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani (KPBKP) merupakan pendekatan baru dalam upaya peningkatan produksi yang memenuhi *economies of size* dan *economies of scale*, dimana pendekatannya dilakukan dari sisi teknis dan kelembagaan. Dengan demikian, perhatian yang diberikan tidak hanya pada *output* atau capaian seperti produksi dan produktivitas, tetapi juga SDM yang terlibat. Petunjuk teknis Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berbasis Korporasi Petani (KPTPBKP) mengatur tujuan, sasaran, indikator keberhasilan sampai dengan strategi pelaksanaan kegiatan.

Indikator keberhasilan program dinilai dari tujuh butir, yaitu 1) tercapainya peningkatan produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing; 2) tersedianya dukungan sarana dan prasarana pertanian secara optimal; 3) teraplikasinya teknologi inovatif spesifik lokasi; 4) peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kewirausahaan petani terutama dalam mengelola kelembagaan ekonomi petani; 5) berfungsinya sistem usahatani secara utuh, efektif dan efisien; 6) peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani; 7) terciptanya kolaborasi antara petani, kelembagaan dengan *offtaker* (pembeli hasil produksi) sehingga kontinuitas pelaksanaan korporasi berjalan sesuai tujuan dan sasaran.

Strategi yang ditetapkan dalam pengembangan kawasan tanaman pangan yaitu 1) penguatan perencanaan pengembangan kawasan; 2) pemberdayaan petani dalam suatu kelembagaan ekonomi petani; 3) penguatan kerja sama dengan pihak lain (pemerintah, bank, perusahaan dan lainnya); 4) penyediaan dan penguatan sarana prasarana; 5) diklat dan pembinaan petani serta rekrutmen agar SDM sesuai klasifikasi kebutuhan; 6) pengembangan industri pengolahan sederhana berbasis pedesaan serta mendorong industri yang menerapkan *zero waste management*; 7) mengembangkan sistem kemitraan, meningkatkan kapasitas dan kualitas produk antara serta mendorong pengembangan industri hilir tanaman pangan yang mampu menghasilkan produk akhir bernilai tambah tinggi.

Petani, pihak swasta, dan pemerintah memiliki peran masing-masing yang dinilai penting untuk menjadi landasan pembentukan *corporate farming*. Koordinasi secara vertikal dan horisontal akan melibatkan tiga *stakeholder* utama tersebut yang diwadahi suatu kemitraan dalam penerapan model *corporate farming*. Menurut Bawono (2018) hal ini dikarenakan petani diwadahi dalam bentuk kelompok dan organisasi, petani dapat bekerjasama dengan pemerintah yang bertindak sebagai fasilitator sekaligus katalisator dalam kegiatan perencanaan, penyusunan strategi usaha, introduksi teknologi terapan spesifik lokasi yang efisien, bantuan akses modal, sarana produksi serta fasilitator dalam proses pemasaran hasil. Sementara kemitraan dengan pihak swasta dapat dilakukan dalam menyediakan berbagai sarana produksi pertanian seperti benih, pupuk,

obat-obatan untuk berusahatani. Selain itu, pihak swasta juga berperan sebagai penampung produksi dan mitra pemasaran pada aspek hilir. Di sisi lain, akademisi (pemerintah) dapat berperan melalui desiminasi hasil penelitian, penerapan teknologi pertanian, pengelolaan produk pertanian agar memiliki nilai tambah, pendampingan pemasaran, serta sebagai pihak yang menghubungkan antara petani dengan swasta. Melalui kemitraan dengan berbagai pihak, *corporate farming* dapat menjadi usaha tani yang lebih efektif dan efisien karena sudah ada keterhubungan dengan pasar, tersedianya alternatif *off-farm*, tersedianya modal, dan adanya lembaga (pemerintah, swasta, perguruan tinggi) yang bersedia sebagai fasilitator sekaligus katalisator. Penerapan program oleh *stakeholder* yang terlibat diatur dalam petunjuk teknis yang terbagi menjadi dua bagian yaitu: tahap kegiatan percontohan dan tahapan pelaksanaan.

Kelembagaan petani dapat ditumbuh dan kembangkan melalui pemberdayaan petani dengan mengubah pola pikir petani agar dapat meningkatkan usahataniya dan meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan fungsinya sehingga mampu mengembangkan agribisnis dan menjadi kelembagaan petani yang mandiri. Kelembagaan Petani dalam mempercepat program ini harus melakukan:

- a. Konsolidasi ke dalam kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum pada skala kawasan;

- b. Penguatan jejaring kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum dengan kelembagaan pelayanan teknis pertanian, serta prasarana dan sarana pertanian; dan
- c. Peningkatan akses kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum terhadap sumber pembiayaan, asuransi, pengolahan dan pemasaran produk pertanian

Elemen utama dalam pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi petani mencakup sebagai berikut:

1. Konsolidasi petani ke dalam kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum
2. Aksesibilitas terhadap fasilitas infrastruktur publik
3. Aksesibilitas terhadap sarana pertanian modern
4. Konektivitas dengan mitra industri pengolahan dan perdagangan modern
5. Aksesibilitas terhadap permodalan dan asuransi usaha tani

Dalam rangka percepatan pengembangan perlu dilaksanakan kegiatan percontohan. Kegiatan percontohan mencakup kegiatan rintisan yaitu:

1. Identifikasi potensi dan permasalahan;
2. Menetapkan lokasi dan desain percontohan;
3. Penataan kelembagaan ekonomi petani berbasis korporasi petani berbadan hukum;
4. Hilirisasi produk pertanian yang dihasilkan petani;

5. Penataan rantai pasok yang efisien dan adil bagi petani;
6. Fasilitasi pengembangan kegiatan percontohan; dan
7. Aksesibilitas terhadap lembaga pembiayaan dan asuransi.

Lokasi kegiatan percontohan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan sesuai dengan Kawasan Pertanian Nasional yang ditetapkan oleh Menteri. Kegiatan percontohan dilaksanakan selama 2 (dua) tahun. Kegiatan percontohan yang berhasil dilaksanakan dalam 2 (dua) tahun, direplikasi di wilayah lain yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Nasional.

Dalam pelaksanaan kegiatan percontohan dibentuk tim dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan atas nama Menteri Pertanian yang anggotanya paling kurang berasal dari lintas Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tim tersebut berlaku sampai akhir kegiatan percontohan dilaksanakan yaitu 2 tahun terhitung sejak ditetapkannya tim pelaksana. Tim kegiatan percontohan mempunyai tugas melakukan:

1. Pemilihan lokasi

Kegiatan ini dilakukan untuk melihat lokasi yang dipilih memenuhi atau tidak kriteria (syarat) yang telah ditetapkan yang dapat berupa satu kawasan Kabupaten untuk satu komoditas, satu kawasan Kabupaten untuk beberapa komoditas, satu komoditas terdiri atas beberapa kawasan Kabupaten.

2. Koordinasi lintas sektor atau pemangku kepentingan

Koordinasi ini dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan keselarasan pemahaman penerapan program korporasi petani pada semua *stakeholder* yang terlibat.

3. Analisis diagnostik

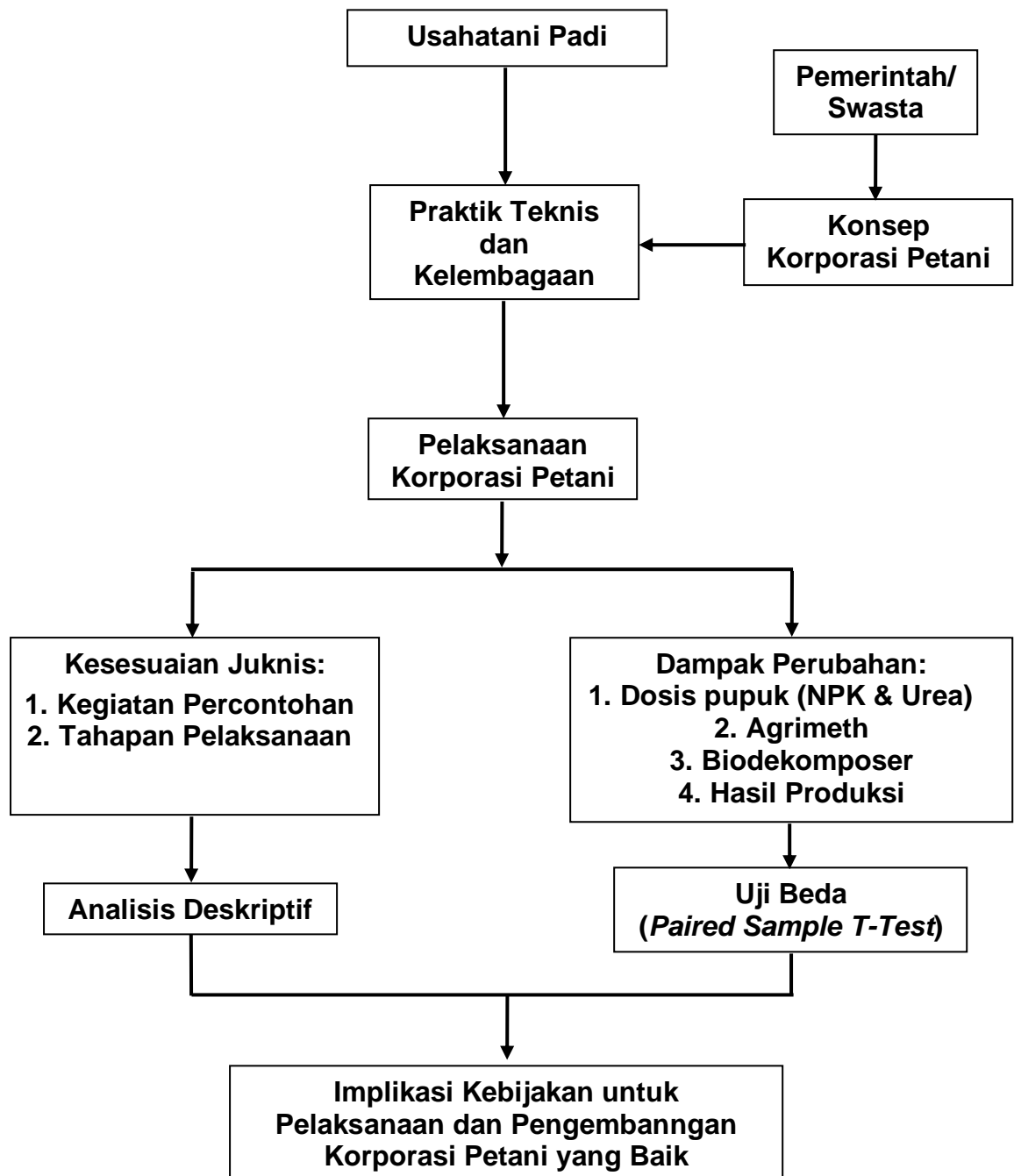
Ruang lingkup analisis diagnostik dibatasi pada tiga hal utama, yaitu produk, pasar dan kelembagaan. Hasil dari analisis diagnostik adalah pengenalan kondisi eksisting di calon lokasi baik aspek teknis maupun sosial ekonomi.

Setelah semua kegiatan percontohan dilakukan, penerapan program kemudian masuk dalam PKPTPBK dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi potensi dan permasalahan wilayah yang sesuai dengan pembangunan kawasan pertanian;
2. Konsolidasi penyusunan rencana kerja dalam Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
3. Pengorganisasian kelembagaan petani dalam suatu kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum;
4. Penataan prasarana dan sarana produksi sesuai kebutuhan dan rencana pengembangan;
5. Penataan rantai pasok komoditas berdasarkan arah pengembangan usaha;

6. Pembinaan, pelatihan, bimbingan teknis dan manajemen, penyuluhan serta pendampingan usaha;
7. Monitoring dan evaluasi untuk ke arah perbaikan.

Dalam penelitian ini, penerapan *corporate farming* di lapangan akan dilihat secara menyeluruh dan menadalam. Sehubungan dengan hal tersebut maka (1) deskripsi pelaksanaannya dikaji berdasarkan Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berbasis Korporasi Petani (2) analisis pengaruh perubahan teknologi terhadap skala usaha tani petani anggota korporasi petani.



Gambar 1. Skema/Kerangka Konseptual

2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Panrannuangku, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi dipilih secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa di lokasi tersebut telah dilaksanakan program korporasi petani. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni-September 2021.

2.3 Penentuan Informan

Pemilihan informan sumber data dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive*. Informan dipilih dengan pertimbangan bahwa pihak-pihak tersebut merupakan seluruh *stakeholder* yang mengetahui informasi dan terlibat secara langsung dalam penerapan Program PKPTPBKP di Kel. Panranguangku berdasarkan survei awal peneliti. Adapun informan yang dimaksud ialah: (1) ada 1 kelompok tani yang terlibat yaitu kelompok tani Semangat 45; (2) pihak swasta yaitu kemitraan petani sebagai penyuplai bibit dan agen pemasarannya; (3) pihak pemerintah dalam hal ini ialah BPTP Sul-Sel, Dinas Pertanian Takalar, dan BPP Polongbangkeng Utara.

2.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu:

1. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya.

Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan (Sugiyono, 2009). Dalam penelitian ini data primer dikumpulkan dengan observasi yaitu observasi pra-penelitian, saat penelitian dan pasca-penelitian yang digunakan sebagai metode pembantu dengan tujuan untuk mengamati objek-objek penelitian dan mewawancarainya seputar program yang mereka jalankan. Data yang diperoleh untuk melihat penerapan *corporate farming* di lapangan oleh BPTP, kelompok tani Semangat 45, pemerintah daerah dan pihak swasta ialah kesesuaiannya dengan tahap pelaksanaan berdasarkan petunjuk teknis PKPTPBP dan data terakhir mengenai pengaruh perubahan teknologi terhadap skala usaha tani padi petani anggota korporasi kemudian dipertajam dengan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan.

2. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat (Sugiyono, 2009). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Dinas Pertanian atau dari sumber lainnya yang mampu mendukung informasi dalam penelitian ini.

2.5 Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan (Sugiyono, 2009) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

2.5.1 Analisis Deskriptif

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, adapun pengertian dari metode deskriptif analisis menurut (Sugiyono, 2009) adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan penerapan *corporate farming* di lokasi penelitian yang dilaksanakan sejak tahun 2018 dengan kerjasama antara petani, pemerintah, dan pihak swasta.

Program Pendampingan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan (Padi) Berbasis Korporasi ini berada di Kel. Panrannuangku, Kec. Polongbangkeng Utara, Kab. Takalar, Prov. Sulawesi Selatan yang dilaksanakan sejak tahun 2018 melibatkan 43 petani. Wawancara dilakukan terhadap seluruh petani yang terlibat sedangkan data pendukung lainnya diperoleh dari instansi terkait di tingkat pusat hingga kabupaten.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam penelitian ini ketentuan pelaksanaan program disesuaikan dengan Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan Berbasis Korporasi Petani tahun 2018 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Tahap Pelaksanaan Program Korporasi Petani

No	Parameter	Indikator
1	Kegiatan Percontohan	
	a. Pemilihan Lokasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi mudah diakses dan memiliki infrastruktur yang memadai 2. Kelembagaan petani cukup berkembang 3. Komoditas yang dikembangkan sesuai dengan sosial budaya setempat 4. Tersedia pasar atau industri pengolahan potensial 5. Kesiapan petani setempat untuk melaksanakan program 6. Lokasi kawasan memperhatikan prinsip kesesuaian lahan 7. Produktivitas masih berpotensi untuk ditingkatkan 8. Tersedia lahan untuk pengembangan kawasan agar memenuhi skala usaha industri 9. Mempertimbangkan jarak tempuh ke lokasi agar efektif dan efisien untuk mempermudah monitoring, pembinaan dan evaluasi.
	b. Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbangun pemahaman yang baik antara pemerintah pusat dan daerah 2. Menggerakkan tim dalam menganalisis model dan pola pengembangan korporasi yang sesuai dengan potensi dan permasalahan usaha tani komoditas 3. Menggerakkan tenaga pendamping atau fasilitator di lapangan dalam pembinaan pelaksanaan kegiatan

	c. Analisis Diagnostik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pola usaha tani dalam 1 (satu) tahun 2. Infrastruktur dasar dan pertanian 3. Kelembagaan petani 4. Kelembagaan pelayanan 5. Kelembagaan usaha tingkat desa 6. Alat mesin pertanian dan sarana pasca panen/pengolahan 7. Ketersediaan tenaga kerja 8. Pasar 9. Mitra industri/perdagangan potensial 10. Akses pembiayaan dan asuransi
	d. Pelaksanaan Kegiatan Percontohan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi potensi dan permasalahan 2. Menetapkan lokasi dan desain percontohan 3. Penataan kelembagaan ekonomi petani berbasis korporasi petani berbadan hukum 4. Hilirisasi produk pertanian yang dihasilkan petani 5. Penataan rantai pasok yang efisien dan adil bagi petani 6. Fasilitasi pengembangan kegiatan percontohan 7. Aksesibilitas terhadap lembaga pembiayaan dan asuransi
2	Tahapan Pelaksanaan PKPTPBKP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi potensi dan permasalahan wilayah untuk pembangunan Kawasan Pertanian 2. Konsolidasi penyusunan dalam Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) 3. Pengorganisasian kelembagaan petani dalam suatu kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum 4. Penataan prasarana dan sarana produksi sesuai kebutuhan dan rencana pengembangan 5. Penataan rantai pasok komoditas berdasarkan arah pengembangan usaha 6. Pembinaan, pelatihan, bimbingan teknis dan manajemen, penyuluhan serta pendampingan usaha 7. Monitoring dan evaluasi untuk kearah perbaikan

2.5.2 Uji Beda (*Paired Sample T-Test*)

Uji beda dilakukan untuk mengetahui perbedaan pada proses dan hasil produksi usahatani padi sebelum dan sesudah pelaksanaan korporasi petani selama tiga tahun. Metode ini digunakan untuk menguji signifikansi beda rata-rata dua kelompok sampel yang berpasangan (berhubungan: sebelum dan sesudah). Sampel yang berpasangan maksudnya adalah dua sampel tapi memperoleh perlakuan berbeda walaupun menggunakan individu yang sama, peneliti tetap memperoleh dua macam data sampel yaitu data perlakuan pertama dan data perlakuan kedua. Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan *software* SPSS.

Penentuan hasil analisis data ialah sebagai berikut:

H_0 : tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara proses dan hasil produksi usahatani padi sebelum dan sesudah penerapan korporasi petani

H_1 : terdapat perbedaan yang signifikan antara antara proses dan hasil produksi usahatani padi sebelum dan sesudah penerapan korporasi petani

Kriteria Pengujian:

- Nilai signifikansi (sig) $<0,05$ menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara proses dan hasil produksi usahatani padi sebelum dan sesudah penerapan korporasi petani

- Nilai signifikansi (sig) $>0,05$ menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara proses dan hasil produksi usahatani padi sebelum dan sesudah penerapan korporasi petani